

ABSTRAK

Promosi jabatan merupakan suatu aktivitas manajemen sumberdaya manusia yang mengalih tugaskan pegawai dari posisi suatu jabatan tertentu ke posisi jabatan yang lebih tinggi dengan tanggungjawab yang lebih besar, serta kompensasi yang lebih baik dari pada posisi jabatan sebelumnya. Pelaksanaan promosi jabatan selain sebagai bagian dari apresiasi pemerintahan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja, kualifikasi kerja juga diharapkan tidak adanya perbedaan perlakuan yang dipromosi atau tidak dipromosikan baik pada perspektif gender, suku, agama dan golongan. Dari uraian tersebut mengambil rumusan masalah Bagaimana konstruksi konsep promosi jabatan pada pemerintah daerah Kabupaten di Indonesia ? Bagaimana implikasi yuridis promosi jabatan di pemerintah Kabupaten Sumenep? Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yaitu dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*), setelah memperoleh bahan hukum, kemudian dilakukan suatu analisa guna mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu konsep promosi jabatan pada pemerintahan daerah di Indonesia dilandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan keselarasan, promosi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah dilakukan secara merit sistem yaitu dengan tidak membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sedangkan implikasi promosi jabatan di pemerintahan Kabupaten Sumenep berjalan dengan baik dapat dilihat dari kemampuan dan kompetensi yang berhubungan dengan suatu proses penerapan konsep kerja dan perencanaan serta mengacu pada kompetensi, kualifikasi, penilaian atas prestasi, intelektual dan cara pegawai tersebut bekerja sama.

Kata kunci : Aparatur Sipil Negara, Promosi Jabatan, Sistem Merit.

ABSTRACT

Promotion is a human resource management activity that transfers employees from a certain position to a higher position with greater responsibility, as well as better compensation than the previous position. The implementation of promotions is not only part of the government's appreciation of civil servants who have work achievements, work qualifications, but it is also expected that there will be no differences in the treatment of those who are promoted or not promoted from the perspective of gender, ethnicity, religion and class. From the description, the author takes the formulation of the problem: How is the construction of the concept of promotion of positions in local Regency governments in Indonesia? What is the practice of promotion in the Sumenep Regency government? This research uses a type of normative legal research, with a Legal approach, and a Conceptual approach. The technique used in the collection of legal materials is by using the library research technique, after obtaining legal materials, then an analysis is carried out to get an answer and conclusion. The results of this study are the concept of promotion of positions in local government in Indonesia based on the principles of justice and harmony, promotion of positions within the local government is carried out on a merit system, namely by not discriminating against political background, race, color, religion, origin, gender, marital status, age, or disability conditions. While the implications of promotions in the Sumenep Regency government are running well, it can be seen from the abilities and competencies related to a process of applying work and planning concepts and referring to competencies, qualifications, assessment of achievements, intellectuals and the way these employees work together.

Keywords: Civil Servant, Promotion, Merit System